

## **BAB 4 KESIMPULAN**

Perjanjian perdagangan regional baik bilateral maupun regional baik pada tingkat yang paling rendah yaitu perdagangan bebas hingga paling tinggi yaitu uni ekonomi berkembang sangat pesat, hampir setiap negara di dunia ini tergabung dalam satu atau lebih perjanjian. Total nilai perdagangan intra regional begitu besar hingga menyumbang setengah perdagangan internasional pada tahun 2005. Fenomena perkembangan regionalisme saat ini tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Sejarah menunjukkan regionalisme pertama-tama muncul di kawasan eropa pada abad ke-19, revolusi industri dan kemajuan teknologi di kawasan eropa memacu munculnya regionalisme. Perang Dunia pertama mengakhiri regionalisme di kawasan itu. Setelah perang berakhir regionalisme pun muncul kembali. Regionalisme pada masa ini ditandai dengan tingkat diskriminatif dan protektif yang sangat tinggi dan regionalisme tidak lagi hanya terkonsentrasi di kawasan eropa tetapi juga terjadi di kawasan Amerika. Regionalisme selanjutnya berkembang pada periode 1950 hingga 1970-an, namun kecenderungan proteksionisme tetap kuat pada masa ini. Hingga akhirnya pada periode pasca Perang Dingin, regionalisme pada periode ini dilatarbelakangi oleh interdependensi ekonomi yang begitu kuat sehingga regionalisme pasca Perang Dingin ini berorientasi ekspor dan investasi asing.

Alasan atau latar belakang ASEAN dan India untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas adalah:

- a. Krisis ekonomi yang membangkitkan kesadaran negara-negara di Asia untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan.
- b. Pengaruh dari kebangkitan ekonomi Cina.
- c. Perjanjian ini adalah bagian dari kebijakan “*Look East Policy*” dan merupakan lanjutan liberalisasi ekonomi di India yang disertai oleh perkembangan sektor jasa serta teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Proses integrasi yang semakin terarah dan jelas di tubuh ASEAN.

- e. Kesadaran pihak ASEAN bahwa India telah berkembang menjadi negara yang kian waktu memiliki peran yang besar dalam kancah politik dan ekonomi dunia.
- f. Statistik perdagangan antara ASEAN dan India yang terus meningkat. Kedua belah pihak melihat besarnya potensi gabungan pangsa pasar antara mereka.
- g. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kedua belah pihak.
- h. India dan ASEAN masing-masing ingin mendapatkan keuntungan lebih di sektor investasi dari perdagangan bebas di tengah ketatnya persaingan ekonomi.

Penghambat proses perundingan yang utama datang dari pihak India. Sejak awal perundingan India telah bersikap tertutup dan protektif terhadap ASEAN. Lobi-lobi pemangku kepentingan domestik India, terutama pemangku kepentingan di sektor pertanian, gencar menekan pemerintah India selama proses perundingan. Selain tekanan dan lobi dari berbagai pihak, situasi politik domestik India, seperti Pemilu, turut memberikan andil dalam sikap India selama proses perundingan FTA.

Tahap pencapaian kesepakatan dibagi menjadi tiga, yaitu tahap penyusunan dan penandatanganan FA, tahap negosiasi dan terakhir tahap penandatanganan perjanjian. Kelancaran dan hambatan negosiasi dari masing-masing tahap banyak dipengaruhi oleh proses berjalannya perundingan itu sendiri serta kondisi masing-masing pihak, baik dari pihak ASEAN maupun India.

Tahap penyusunan dan penandatanganan FA, dalam tahap ini dari sisi proses perundingan tidak mengalami banyak permasalahan, setelah mendapatkan rekomendasi dari hasil kajian gabungan, ASEAN dan India segera membentuk sebuah *Task Force* untuk menyusun FA dan tidak lama kemudian FA tersebut ditandatangani, permasalahan barulah muncul ketika masuk ke dalam pembahasan ROO untuk EHP. Sedangkan dari sisi kondisi politik domestik India, negara itu pada tahap penyusunan dan penandatanganan FA dipimpin oleh Atal Bihari Vajpayee dan partainya BJP yang berideologi kanan. Perdagangan bebas dan investasi asing menjadi fokus kebijakan ekonomi Vajpayee, hal itu tentunya menjadi faktor yang sangat memengaruhi kelancaran proses penyusunan kerangka

kerja integrasi (FA). Bagaimanapun juga, Vajpayee adalah pihak yang menginisiasikan pembentukan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Di sisi ASEAN, terpicu oleh krisis ekonomi 1997/1998 organisasi ini memperkuat integrasi dirinya dan juga memperkuat integrasi dengan para mitra dagangnya di kawasan Asia. Keterbukaan ASEAN tentunya mendorong kelancaran proses penyusunan.

Tahap kesepakatan secara prinsip merupakan tahap yang paling lama dalam proses penyusunan dan penandatanganan kesepakatan perdagangan barang AIFTA (dari tahun 2003 hingga tahun 2008). Dua permasalahan utama pada masa ini adalah perundingan yang menyangkut ROO dan komoditas yang masuk daftar sensitif / negatif. Hingga akhirnya kedua belah pihak pernah mencapai titik buntu pada tahun 2007 dan sempat diberhentikan hingga dua kali. Pada periode ini India merubah strateginya menjadi strategi integrative seperti mengajukan penawaran yang sangat tinggi dan bersikap tertutup atau proteksionis untuk mendapatkan keuntungan lebih dari proses negosiasi. Faktor domestik India yang memengaruhi proses dalam tahap negosiasi ini adalah lobi-lobi pihak berkepentingan terhadap hasil kesepakatan, pihak-pihak itu adalah para petani dan juga pengusaha. Tekanan pun datang dari tingkat koalisi partai, pada tahap negosiasi ini India berada dalam pemerintahan koalisi *United Progressive Alliance* (UPA) yang dipimpin partai Kongres. Di sisi lain, yaitu ASEAN, oleh beberapa pihak dikatakan terlalu kaku namun tampaknya kekakuan itu untuk menuntut sikap yang lebih terbuka dari mitra dagangnya (dalam hal ini India) jika ingin membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Walau bagaimanapun juga sikap ASEAN semasa perundingan akan dipengaruhi pula oleh sikap beberapa negara anggotanya yang akan mendapat keuntungan besar dari terciptanya perdagangan bebas ASEAN-India, yaitu Singapura.

Dan pada tahap penandatanganan Perjanjian, dari proses perundingan hambatan yang muncul adalah proses penyelesaian PSR, kerangka dan sistem baru penurunan tarif, perubahan penggunaan HS dari HS 2002 menjadi HS 2007 beserta seluruh proses verifikasi menjadi faktor yang memperlambat penandatanganan kesepakatan. Pada tahap ini, India menerapkan strategi *distributive* dengan selalu berusaha bersikap keras dalam mempertahankan